

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia sebagaimana telah disebutkan dalam landasan konstitusional merupakan negara hukum. Sifat dari negara hukum yaitu semua tata negara diatur dalam perundang-undangan yang dibuat, disepakati, dan disahkan oleh pihak-pihak yang berwenang. Sistem pemerintahan juga telah tercantum dalam undang-undang dimana presiden memiliki kekuasaan tertinggi yaitu sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Luasnya wilayah negara Indonesia yang terdiri dari beberapa provinsi tidak memungkinkan apabila presiden memimpin setiap wilayah seorang diri. Oleh karena itu dibuatlah bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang berarti hak, wewenang, dan kewajiban setiap daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 disebutkan bahwa yang termasuk dalam pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Salah satu perangkat daerah yang membantu kepala daerah adalah dinas daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah. Pada dinas daerah tingkat kabupaten mempunyai tugas untuk melaksanakan kewenangan desentralisasi. Setiap daerah memiliki peraturan daerah yang berbeda-beda mengenai penamaan maupun jumlah kantor dinas sesuai dengan karakteristik daerah.

Dinas daerah membantu mengelola dan mengembangkan sumber ekonomi, sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki daerah. Pemerintah daerah melalui dinas daerah akan melaporkan seluruh kegiatan selama satu periode kepada pemerintah pusat sebagai pertanggungjawaban. Pelaporan yangutamakan adalah laporan keuangan yang meliputi laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pejabat Pengelola

Keuangan. SKPD dilaksanakan oleh seluruh SKPKD dilingkungan pemda seperti Dinas, Badan dan Kantor. Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan seluruh hasil kegiatan operasional dinas. Oleh karena itu laporan keuangan diharapkan dapat disajikan secara wajar menurut Standar Akuntansi Pemerintah.

Sebagai instansi pemerintah, dinas daerah menjalankan kegiatan operasional dengan membutuhkan sumber-sumber dana yang mempunyai nilai ekonomis, salah satunya melakukan investasi pada aset tetap. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) nomor 7 menyebutkan pengertian Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap disajikan dalam laporan keuangan pemerintah yang masuk dalam komponen neraca. Nilai aset tetap mempengaruhi posisi keuangan karena adanya penyusutan nilai sepanjang masa manfaat aset tetap. Penyusutan aset tetap terjadi dikarenakan penggunaan aset tetap dalam kegiatan operasional yang nantinya akan menjadi beban dan secara otomatis akan mempengaruhi laporan laba rugi.

Mengingat bahwa tujuan dari pengadaan aset tetap adalah untuk mendukung kegiatan operasional dan tidak untuk diperjual belikan, maka proses pengadaan serta cara perolehannya juga harus diperhitungkan dengan tepat. Penentuan harga perolehan aset tetap tidak hanya dinilai dari harga beli, tetapi mencakup seluruh pengeluaran yang digunakan untuk memperoleh aset sampai aset tersebut siap untuk dioperasikan perusahaan. Secara teoritis yang dimaksud harga perolehan yaitu meliputi semua pengeluaran yang diperlukan untuk mendapatkan aktiva tetap dan pengeluaran-pengeluaran lain agar aktiva siap untuk digunakan (Haryono Jusup, 2005: 155). Selama penggunaannya suatu aset tetap harus dihentikan dengan alasan dijual, ditukar dengan aset tetap lainnya, atau berakhirnya masa manfaat aset tetap sehingga perlu diganti dengan aset tetap yang baru.

Terdapat banyak metode penyusutan aset tetap diantaranya adalah metode garis lurus, metode saldo menurun ganda serta metode unit produksi. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah menyebutkan bahwa metode penyusutan aset tetap yang digunakan adalah metode garis lurus dengan estimasi masa manfaat sesuai dengan pedoman yang telah diatur. Metode garis lurus adalah metode yang paling sederhana dalam penerapannya yaitu dengan cara membagi nilai perolehan aset tetap dengan masa manfaat yang telah ditentukan.

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati merupakan dinas daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam menjalankan kegiatan operasional tentu membutuhkan aset tetap. Tugas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam garis besar adalah melaksanakan perbaikan secara menyeluruh terhadap tatanan penyelenggaraan Pemerintahan dibidang transportasi dan teknologi informasi, khususnya terhadap perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu seperti instansi pemerintah lainnya Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati juga melakukan investasi pada aset tetap untuk menjalankan kegiatan operasionalnya.

Dalam prakteknya aset tetap di DISHUBKOMINFO Pati mengikuti alur standar operasional prosedur yang telah diatur pada peraturan daerah mulai dari pengadaan, penyusutan hingga penghapusan maupun pertukaran aset tetap. Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas tentang aset tetap dengan mengajukan judul “Metode Penyusutan Aset Tetap pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Pati”.

1.2 Ruang Lingkup

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, penulis membatasi ruang lingkup penulisan yang akan dibahas dalam laporan Tugas Akhir mengenai penerapan metode penyusutan aset tetap pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati. Hal ini dimaksudkan agar pembahasan dalam laporan Tugas Akhir tidak menyimpang dari judul penulisan.

Berdasarkan judul tersebut, maka ruang lingkup pembahasan masalah dapat dirumuskan secara garis besar dalam beberapa bagian meliputi :

1. Pengertian dari Penyusutan Aset Tetap.
2. Klasifikasi Aset Tetap.
3. Masa Manfaat Aset Tetap
4. Dokumen dan catatan akuntansi yang digunakan
5. Bagan Alir Prosedur Pencatatan Penyusutan Aset Tetap.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dari penulisan Tugas Akhir ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengertian dari aset tetap.
2. Untuk mengetahui pengklasifikasian aset tetap pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati.
3. Untuk mengetahui masa manfaat aset tetap pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati sebagai instansi pemerintah daerah.

4. Untuk mengetahui proses akuntansi penyusutan aset tetap yang berjalan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati.
5. Untuk mengetahui penerapan metode penyusutan (depresiasi) aset tetap Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

1.3.2.1 Bagi Penulis

Selain sebagai syarat kelulusan, penyusunan Tugas Akhir ini juga memberikan kegunaan yang bermanfaat bagi penulis yang tidak dapat diperoleh pada bangku perkuliahan. Penulis bisa mempraktekkan teori yang di dapat pada dunia kerja nyata khususnya dalam mengetahui lebih dalam mengenai aset tetap. Selain itu kegunaan penulisan Tugas Akhir bagi penulis juga sebagai :

1. Sarana latihan dan penerapan ilmu pengetahuan perkuliahan.
2. Meningkatkan kemampuan dan sosialisasi di lingkungan kerja.
3. Menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan di lapangan kerja mengenai dunia kerja.
4. Agar mahasiswa memperoleh keterampilan dan pengalaman kerja praktis sehingga secara langsung dapat memecahkan permasalahan yang ada dalam kegiatan di bidangnya.
5. Agar mahasiswa dapat melakukan dan membandingkan penerapan teori yang diterima di jenjang akademik dengan praktek yang dilakukan di lapangan.

1.3.2.2 Bagi Fakultas

1. Sebagai Sarana untuk memperoleh informasi mengenai keadaan umum perkembangan dinas pemerintahan dalam gambaran nyata.
2. Terciptanya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak, yaitu dapat menempatkan mahasiswa yang potensial untuk mendapatkan pengalaman di perusahaan atau instansi yang bersangkutan.

1.3.2.3 Bagi Pemerintah Daerah

Merupakan sarana untuk menjembatani antara instansi atau perusahaan dengan lembaga pendidikan untuk bekerjasama lebih lanjut baik bersifat akademik maupun non akademik. Perusahaan atau instansi dapat melihat tenaga kerja yang potensial dikalangan mahasiswa sehingga apabila suatu saat membutuhkan karyawan bisa merekrut mahasiswa tersebut.

1.4 Cara Pengumpulan Data

1.4.1 Data Penelitian

Arti data dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan). Data digunakan sebagai informasi yang diperoleh melalui pengamatan suatu obyek sehingga memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan yang terbukti kebenarannya. Dalam laporan Tugas Akhir ini, penulis menggunakan jenis data :

1. Menurut sifatnya

a. Data Kualitatif

Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka, misalnya: Kuesioner Pertanyaan tentang suasana kerja, kualitas pelayanan sebuah rumah sakit atau gaya kepemimpinan, dll.

b. Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, misalnya: harga saham, besarnya pendapatan, dll.

2. Menurut sumbernya

a. Data Internal

Data internal adalah data dari dalam suatu organisasi yang menggambarkan keadaan organisasi tersebut. Contohnya: suatu perusahaan, jumlah karyawannya, jumlah modalnya, atau jumlah produksinya, dll.

b. Data Eksternal

Data eksternal adalah data dari luar suatu organisasi yang dapat menggambarkan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi hasil kerja suatu organisasi. Misalnya: daya beli masyarakat mempengaruhi hasil penjualan suatu perusahaan.

3. Menurut cara memperolehnya

a. Data Primer (primary data)

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan/suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa interview, observasi.

b. Data Sekunder (secondary data)

Data sekunder adalah data yang diperoleh/ dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain. Biasanya sumber tidak langsung berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu langkah yang digunakan penulis agar memperoleh data–data yang dibutuhkan dalam penyusunan karya tulis. Penulis mengumpulkan data yang berkaitan dengan tujuan dari judul yang diangkat. Tujuan dari pengumpulan data itu sendiri adalah sebagai data pendukung seberapa konkrit suatu karya tulis dibuat sesuai dengan fakta yang ada tanpa rekayasa. Dalam penulisan Tugas Akhir ini dengan judul Metode Penyusutan Aset Tetap pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati, penulis menggunakan metode pengumpulan data :

1. Observasi

Observasi merupakan cara atau teknik pengumpulan data dengan mengamati keadaan sekitar obyek pengamatan. Teknik ini digunakan apabila penelitian ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar. Observasi dilakukan secara terencana, terarah dan sistematis untuk memperoleh data dan informasi yang sesuai dengan kondisi yang ada dan dapat mendukung kelengkapan penulisan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan cara atau teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab kepada narasumber yang dipercaya dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Tugas Akhir ini. Penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur dimana sebelum melakukan tanya jawab dengan narasumber, penulis terlebih dahulu menyiapkan rangkaian pertanyaan.

3. Studi Kepustakaan

Penulisan tugas akhir ini dilakukan dengan membaca, mencatat, dan mempelajari buku-buku pustaka yang bersangkutan dengan obyek yang diteliti dalam metode studi pustaka. Metode ini dilakukan untuk menambah data yang diperlukan dalam penyusunan Tugas Akhir serta dapat menambah pengetahuan mengenai teori yang diperoleh melalui literatur, dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan topik yang akan dibahas.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Tugas Akhir berisi mengenai hal-hal sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah pada instansi dan seberapa penting masalah yang akan diangkat oleh peneliti mencakup, latar belakang masalah, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, cara pengumpulan data penelitian dan sistematika penulisan yang akan digunakan.

BAB II : GAMBARAN UMUM INSTANSI PEMERINTAH DAERAH

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum instansi pemerintah tempat pelaksanaan magang tentang latar belakang berdirinya, kapan didirikan dan perkembangannya hingga sekarang. Menjelaskan mengenai struktur organisasi instansi beserta tugas per bagian semua bidang pada instansi. Dalam bab ini juga disebutkan visi dan misi instansi dalam mencapai tujuan instansi, serta hal-hal yang berkaitan dengan instansi.

BAB III : PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis membahas mengenai teori-teori umum yang berkaitan dengan perumusan masalah yang telah disebutkan pada Bab I yaitu mengenai penyusutan aset tetap pada instansi pemda. Menjelaskan juga mengenai penerapan teori dengan pelaksanaan praktek kerja pada instansi pemerintah daerah.

BAB IV : KESIMPULAN

Pada bab ini berisi kesimpulan yang disusun dalam bentuk ringkasan mengenai pembahasan Tugas Akhir yang membahas mengenai penerapan metode penyusutan aset tetap pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati.